

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya jual beli pada era sekarang ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan internet. Sekarang ini jika konsumen membutuhkan sesuatu barang, akan dengan mudah menemukan barang tersebut melalui internet. Jual beli sekarang ini tidak hanya di dalam toko atau pasar, namun berubah menjadi jual beli online. Di samping lebih mudah dan ongkos kirim tidak begitu tinggi (jika dibandingkan dengan banyaknya biaya yang dihabiskan untuk ke tujuan), dunia online juga menyajikan varian barang yang banyak dan unik.

Akibat dari fenomena ini banyak orang yang membuka toko secara *online*. Beberapa kelebihan dari toko yang menjual barang secara online ini adalah biaya sewa yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya sewa toko atau ruko. Biaya untuk promosi di internet jauh lebih mudah dan murah dibandingkan berpromosi di media cetak. Salah satu contohnya adalah melalui facebook, dimana pemilik toko dapat mengatur budget beriklan setiap harinya dan target dari iklannya dapat ditentukan sesuai dengan apa yang dijualnya. Kelemahan jual beli secara online ini adalah adanya penipuan dari pihak pembeli maupun penjual.¹

¹ Adi Nugroho, 2006, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, Hal. 8.

Bisnis toko online semakin meningkat, hal ini mendorong timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama di antara para pengusaha guna mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara para pengusaha. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa perjanjian yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah Perjanjian sewa-beli, *Fidusia*, *Franchise*, *Leasing*, dan Konsinyasi (*Consignment*).²

Salah satu perjanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut titip-jual. *Consignment* (konsinyasi) adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*). Penerimaan titipan barang tersebut (*consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan.. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.³

² Satrio J, 1995, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 148

³ Aliminsyah dan Padji, 2003, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Penebar Swadaya, Jakarta, Hal 77

Salah satu situs toko online yang menggunakan sistem konsinyasi adalah 8wood. Toko online ini didirikan oleh artis Alice Norin. Pada awalnya 8wood menjual produk milik Alice Norin dengan *brand* 8wood saja, namun dalam perkembangannya toko online ini menjual produk-produk dari *brand* yang lain juga dengan sistem kerjasama konsinyasi. Supplier atau pihak kedua dari toko online adalah desainer muda yang memproduksi produknya sendiri dan memproduksinya secara terbatas agar tetap eksklusif. Perjanjian jual beli dalam KUH Perdata diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata tentang perjanjian, memberikan definisi mengenai jual beli yang tertera dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu: *“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*.

Menurut pengertian konsinyasi tersebut diatas diatur dalam KUH Perdata pasal 1404 yang berbunyi:

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang ; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”.

Dalam penjelasan Pasal 1404 KUH Perdata di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat.

Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan kontrak kerjasama konsinyasi supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo, konsinyasi dalam KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama supplier dengan Toko Online 8wood mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. Kontrak kerjasama konsinyasi supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, distributor dan keagenan supplier memproduksi barang menjualkannya dan mendistribusikan melalui Toko Online 8wood tersebut, hal ini merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III KUH Perdata yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap, yang sifatnya mengatur.

Dari pengertian kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUH Perdata maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo ini disebut kontrak tidak bernama karena kontrak kerjasama konsinyasi yang dimaksud walaupun dalam prakteknya sudah umum digunakan akan tetapi pengertian di dalamnya berbeda dengan yang dimaksud dengan konsinyasi dalam KUH Perdata. Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya

perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian. Dalam kontrak kerjasama ini supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada Toko Online 8wood untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu : supplier yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan Toko Online 8wood sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo, tentang keberadaan dari pihak lain, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama konsinyasi yang dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para Supplier dan Toko Online 8wood yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama, dimana dalam Toko Online 8wood sebagai tempat distribusi dan penjualan dan supplier sebagai penyuplai barang, hal ini adalah erat keterkaitannya dengan kontrak

kerjasama konsinyasi yang di keluarkan oleh supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KONSINYASI: STUDI TENTANG KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ANTARA SUPPLIER HOUSE OF ORCHITA DENGAN TOKO ONLINE PT. 8WOOD TELEINDO.**

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8wood teleindo?
2. Bagaimakah perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8wood Teleindo.
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata tentang perjanjian
- c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman pada ilmu hukum dalam bidang perdata khususnya hukum bisnis

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk para supplier dan distributor pada umumnya yang akan memberikan atau menitipkan barangnya kepada toko online.
- b. Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada para pihak yang melakukan perjanjian konsinyasi.

E. Kerangka pemikiran

1. Pengertian Perjanjian Penitipan

Perjanjian Penitipan barang merupakan suatu perjanjian riil yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal, dasar ukumnya ada pada pasal 1694 KUH Perdata. Terdapat dua macam penitipan barang:

- a. Penitipan sejati yaitu yang dibuat dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya dan terhadap barang bergerak.
- b. Penitipan sekestrasi yaitu perjanjian penitipan barang dalam hal terjadinya perselisihan. Barangnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tetap, dan keberadaannya adalah pada pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk menyimpan barang tersebut dan akan mengembalikannya kepada siapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya. Penitipan bentuk ini dapat terjadi karena persetujuan para pihak ataupun karena adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Penitipan

Perjanjian penitipan adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian penitipan yaitu sebagai pengamanat atau komisioner, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

Objek perjanjian penitipan dapat berupa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya.

3. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Berhubungan dengan Perjanjian Penitipan

Kedua belah pihak harus menaati perjanjian konsinyasi. Pihak konsinyi sebagai pihak yang menjual barang memiliki hak dan kewajiban yang datur dalam undang-undang penitipan dan keagenan. Antara lain:⁴

a. Hak Konsinyi

- 1) Pihak konsinyi berhak memperoleh penggantian atau pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi, dan biasanya meliputi pengangkutan, asuransi, pajak, penyimpanan, penanggungan reparsi dibawah garansi dan beban lainnya yang biasanya ditanggung pihak konsinyor pengeluaran yang ditetapkan dengan persetujuan

⁴ Harry Simons, 2001, *Advanced Accounting*, diterjemahkan oleh Kartini R.A.F dan R.A Fadly Bangkalany, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 77

husus atau yang dapat dibebankan oleh undang-undang kepada pihak konsinyor. Dan jumlah yang harus diberikan sebagai imbalan atas penjualan, merupakan hak gadai konsinyi atas barang konsinyasi tidak cukup untuk menutup beban seperti itu, maka pihak konsinyi dapat menuntut kekurangannya kepada pihak konsinyor.

- 2) Pihak Konsinyi berhak menawarkan garansi atas barang konsinyasi yang dijual, sementara itu pihak konsinyor terkait pada syarat pemberian garansi seperti ini.

b. Kewajiban Konsinyi

- 1) Pihak *Konsinyi* harus merawat dan melindungi barang-barang yang dititipkan konsinyor.
- 2) Pihak *konsinyi* menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditetapkan oleh konsinyor. Bila konsinyor tidak menentukan harga , maka dijual dengan harga yang dapat memuaskan pihak konsinyor. Pihak konsinyi dapat menjual barang konsinyasi baik secara tunai maupun kredit dengan kerugian penjualan dibebankan pada pihak konsinyor dan penhiriman uangnya dilakukan hanya setelah penaggihan dilakukan yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab pihak konsinyi
- 3) Pihak Konsinyi harus mengirimkan perkiraan penjualan konsinyasi (account sales), mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi , laporan ini mencakup informasi tentang penerimaan barang konsinyasi penjualan barang konsinyasi, harga jual, biaya penjual, jumlah terutang.

F. Metode Pendekatan

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam penelitian ini mendasarkan pada pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap taraf sinkronisasi baik yang vertikal maupun yang horizontal.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu konstruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Supplier Orchita dengan Toko Online 8wood serta perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

- 1) Surat perjanjian konsinyasi antara Supplier Orchita Dengan Toko Online 8wood.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

5. Analisis data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murini dari Hans Kelsen. .

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf sinkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diinventarisir, yang menjadi objek penelitian.

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,
- c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Waktu Penelitian, dan Sistematika Skripsi

Bab II adalah Landasan Teori yang akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Perjanjian dan Perjanjian Penitipan.

Bab III adalah Pembahasan Hasil Penelitian yang berisikan Bentuk dan isi / konstruksi dari perjanjian konsinyasi antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo, dan Perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.